

**PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN AKUNTANSI DALAM UPAYA PENINGKATAN
KOMPETENSI KEUANGAN PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL dan MENENGAH (UMKM) DI
PONOROGO**

KHUSNATUL ZULFA WAFIROTIN¹⁾, HADI SUMARSONO²⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jalan Budi Utomo Nomor 10, telp. 0352-481124 Ponorogo
E-mail : Khusnafeump@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pelaku UMKM yang tidak mampu mengakses pembiayaan dari perbankan karena mereka belum bisa memenuhi persyaratan perbankan untuk memperoleh pinjaman. Banyak UMKM kita yang tidak bankable, karena umumnya UMKM belum mempunyai pembukuan yang baik. Padahal pembukuan yang baik merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Tujuan dari penelitian ini adalah tahun pertama, mengidentifikasi data base kemampuan dasar tentang akuntansi bagi para pelaku UMKM di Ponorogo. Tahun kedua, menyusun model pelatihan akuntansi yang dapat meningkatkan kompetensi keuangan bagi pelaku UMKM di Ponorogo. Metode yang digunakan untuk menyusun data base yang dibutuhkan pada tahun pertama diperoleh dengan melakukan pendataan secara langsung (data primer dan observasi) di lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dan melakukan pengamatan secara langsung kepada para pelaku UMKM di Ponorogo untuk menilai kemampuan dasar akuntansi bagi para pelaku UMKM di Ponorogo. Hasil penelitian tahun pertama (2016) menyimpulkan bahwa : Kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Ponorogo dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu ; dari ketujuh variabel yang diteliti meliputi; omzet penjualan, sumber modal yang digunakan, penghasilan bersih setiap bulan, penyusunan laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, kendala dalam penyusunan laporan keuangan, pelatihan yang pernah diikuti oleh para pelaku UMKM di Ponorogo. Lebih dari 50% dari UMKM mengalami kesulitan permodalan. UMKM yang memanfaatkan sumber permodalan eksternal dari lembaga penyalur kredit hanya sebesar 20%. Alasan UMKM belum memanfaatkan kredit sebagian besar adalah faktor kebijakan, persyaratan (termasuk akuntansi) dan tingkat suku bunga kredit yang cukup tinggi.

Kata Kunci : Kompetensi Akuntansi, Permodalan, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini memiliki peran yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap PDB (tanpa migas) pada Tahun 2011 tercatat sebesar 60%. Kontribusi signifikan UMKM juga tampak dari penciptaan berbagai lapangan pekerjaan baru. Dari data yang sama, pada 2011 UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja. (Sindonews 2015)

Data dari Dinas Industri, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah industri formal sebanyak 614 unit yang menyerap 6.429 tenaga kerja dengan nilai produksi 734,17 miliar rupiah. Sedangkan untuk industri non formal sebanyak 19.086 unit dengan jumlah tenaga kerja 39.541 (Ponorogo dalam angka 2014).

Kebanyakan UMKM tidak mempunyai kemampuan mengakses pembiayaan dari perbankan karena mereka belum bisa memenuhi persyaratan perbankan untuk memperoleh pinjaman. Banyak UMKM kita yang tidak *bankable*, karena umumnya UMKM belum mempunyai pembukuan yang baik, padahal pembukuan yang baik merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Kegunaan yang penting dari pembukuan usaha justru bagi keperluan internal, yakni untuk membantu pengusaha dalam mengendalikan keuangan perusahaannya, dengan meningkatkan kesadaran pentingnya pemisahan keuangan perusahaan dengan pribadi.

Menurut Teguh, (1992) dalam Lilik Indrawati (2006) menyatakan bahwa salah satu aspek analisis kredit yang dilakukan oleh lembaga pemberi kredit (perbankan dan non perbankan) adalah aspek keuangan. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang terkait dengan aspek keuangan adalah bahwa para pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha (Idrus, 2000).

Berangkat dari pemaparan tersebut diatas maka masalah penelitian akan berkisar pada upaya peningkatan kompetensi keuangan bagi pelaku UMKM di Ponorogo, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana kemampuan dasar tentang akuntansi bagi pelaku UMKM di Ponorogo ?

Urgensi Penelitian

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM masih menjadi kelompok marginal yang sulit dikaitkan dengan usaha modern dan atau usaha besar. Salah satu indikator dari kondisi tersebut adalah kesulitan UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Formal (LKF) terutama perbankan. Indikasi dari ketidakmampuan UMKM tersebut terlihat dari rendahnya alokasi dana/kredit dari bank-bank umum untuk UMKM. Hal ini terkait dengan kemampuan UMKM di dalam mengelola keuangan. Berdasarkan hasil survey Bank Indonsia, salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dilihat dari perspektif UMKM itu sendiri dan pihak perbankan adalah kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan (Andang Setyobudi, 2007). Kemudian Idrus (2000), menyatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membutuhkan keterampilan pembukuan dan akuntansi yang mudah aplikasinya guna membantu mereka mengakses pembiayaan dari perbankan. Selama ini banyak UKM tidak mampu mengakses pembiayaan dari perbankan karena mereka tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Banyak UKM kita yang tidak *bankable*, karena umumnya UKM tidak mempunyai pembukuan yang baik, padahal pembukuan yang baik merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Kegunaan yang penting dari pembukuan usaha justru bagi keperluan internal, yakni untuk membantu pengusaha dalam mengendalikan keuangan perusahaannya, dengan meningkatkan kesadaran pentingnya pemisahan keuangan perusahaan dengan pribadi.

Dari kondisi UMKM diatas, maka penelitian ini penting dilakukan dengan harapan dapat terwujud model pelatihan akuntansi yang cocok dan bisa meningkatkan kompetensi keuangan bagi pelaku UMKM di Ponorogo sehingga mudah dalam mengakses kredit atau memperoleh pendanaan terutama dari perbankan. Disamping itu dari hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi banyak pihak karena akan terwujud artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Nasional.

STUDI PUSTAKA

Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki, kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat digolongkan menjadi 3 jenis usaha. Kriteria penggolongan jenis usaha ini dapat dilihat dalam tabel 1 :

Tabel 1. Kriteria UMKM berdasarkan aset yang dimiliki

No	Jenis Usaha	Kriteria	
		Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2.	Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 milyar
3.	Usaha Menengah	> 500 juta – 10 Milyar	>2,5 milyar – 50 milyar

Permasalahan Yang Di hadapi Oleh UMKM

Menurut Andang (2007), terdapat beberapa kategori permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu :

- a. Permasalahan yang mendasar dan bersifat klasik pada UMKM (*basic problems*), adalah berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.
- b. Permasalahan lanjutan (*advanced problems*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di Negara tujuan ekspor.
- c. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, akuntansi, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Sementara itu, dari hasil survey tentang profil UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Andang, 2007), terdapat permasalahan maupun kendala UMKM yang dilihat dari perspektif UMKM itu sendiri maupun dari perbankan. Dari sisi UMKM beberapa variabel penting yang masih rendah

kinerjanya antara lain: a) Kemudahan UMKM dalam memperoleh ijin. b) Kemampuan UMKM untuk mengelola keuangan; c) Ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit dan; tenaga kerja yang trampil.

Sedangkan dari sisi perbankan, variabel-variabel UMKM yang berkinerja rendah di antaranya adalah:

- a. Kemampuan pengelolaan keuangan;
- b. Ketrampilan tenaga kerja;
- c. Kapabilitas pemasaran;
- d. Kontrol kualitas dalam produksi.

Upaya Pengembangan UMKM

Muhammad Jafar (2004) menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

- b. Bantuan permodalan

Perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

- c. Perlindungan usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

- d. Pengembangan kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha.

- e. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, keuangan, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup dan Obyek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Ponorogo, khususnya pelaku usaha mikro yaitu yang memiliki aset maksimal 50 juta dan omzet penjualan maksimal 300 juta dalam 1 tahun.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pertimbangan keefektifan uji coba program (pelatihan) maka jumlah UMKM yang dapat diikuti dalam kegiatan ini adalah sebanyak 20 UMKM, setiap UMKM terdiri dari 1 orang, sehingga jumlah pelaku UMKM yang akan ikut program pelatihan akuntansi sebanyak 20 orang untuk setiap kelompok pelatihan. Kriteria penjurangan peserta : a). Usahanya berskala mikro dan kecil, b). Tidak mampu melaksanakan tahapan dalam kegiatan akuntansi, c). Belum pernah mendapat bantuan modal dari perbankan, d). Berkeinginan untuk mengikuti pelatihan akuntansi. Berdasarkan data yang ada dari dinas Indakop ada 50 UMKM yang terdaftar dan peneliti berhasil melakukan wawancara dengan mereka.

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara secara langsung dengan pelaku UMKM yang dibantu dengan kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik, maupun Dinas Indakop. Untuk mendukung keabsahan data juga dilakukan observasi dan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi UMKM di masing-masing lokasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat ada 7 (tujuh) variabel penting yang dapat menggambarkan bagaimana kompetensi keuangan terutama dibidang akuntansi bagi para pelaku usaha MUKM di Ponorogo. Ketujuh variabel yang diteliti tersebut yaitu meliputi; omzet penjualan, sumber modal yang digunakan, penghasilan bersih setiap bulan, penyusunan laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, kendala dalam penyusunan laporan, pelatihan yang pernah diikuti. Berikut ini akan dibahas satu persatu dari variabel tersebut diatas, sehingga akan nampak jelas bagaimana kompetensi keuangan terutama dibidang akuntansi bagi para pelaku usaha UMKM di Ponorogo.

1. Omzet Penjualan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa omzet penjualan pelaku UMKM pertahun dari 50 responden adalah ; yang < Rp 300 Juta, sebanyak 47 orang atau mencapai 94% dan yang > Rp 300 Juta sebanyak 3 orang atau 6% . Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha UMKM di Ponorogo adalah termasuk pengusaha mikro, hal ini sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kondisi ini mencerminkan bahwa para pelaku UMKM ini memang dituntut untuk menghasilkan produksi, terutama berkaitan dengan ekonomi keluarga. Dengan kata lain, mereka dituntut untuk berkarya. Dengan tanggungan menghidupi keluarga, sementara mereka tidak mampu bersaing di sektor formal, maka mereka berusaha di sektor informal. Hal ini bisa difahami karena memang bekerja di sektor informal tidak membutuhkan persyaratan yang rumit.

Kondisi di atas juga menunjukkan bahwa para pelaku UMKM masih membutuhkan modal yang banyak/besar untuk mengembangkan usaha mereka.

2. Sumber Modal Yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber modal yang digunakan untuk menjalankan usaha yang berasal dari pinjam bank adalah sebesar 20% atau 10 orang, dari Modal sendiri 70% atau 35 orang, Pinjam saudara 6% atau 3 orang, Pinjam koperasi 2% atau 1 orang dan dari Arisan 2% atau 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber modal yang digunakan oleh para pelaku usaha UMKM adalah dari modal sendiri dan mereka mayoritas belum memanfaatkan fasilitas dari perbankan, hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor; diantaranya kurangnya persyaratan untuk mengajukan pinjaman ke bank terutama terkait dengan laporan keuangan, karena mayoritas para pelaku UMKM tidak menyusun laporan keuangan dengan berbagai alasan. Disamping itu, para pelaku UMKM masih takut dengan bunga bank, yang menurut mereka bunga bank sangat tinggi dan sangat membebani. Mereka justru lebih nyaman dengan menggunakan modal sendiri walaupun jumlahnya masih sangat terbatas atau relatif sedikit. Dengan demikian hal ini akan berdampak terhadap perkembangan usaha mereka yang dari tahun ke tahun masih stabil, belum menunjukkan perkembangan yang begitu pesat.

3. Penghasilan bersih setiap bulan

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa penghasilan bersih perbulan dari para pelaku UMKM adalah yang < 5 Juta rupiah yaitu 70% atau sebanyak 35 orang, semestara itu yang > 5 Juta rupiah yaitu 30% atau sebanyak 15 orang. Hal ini, bisa dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah modal yang digunakan oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Mayoritas mereka tidak berani melakukan pengembangan usaha dengan pinjam ke bank, sehingga usaha mereka tetap kecil dan tentunya sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang mereka peroleh. Dengan kata lain semakin banyak jumlah modal yang digunakan untuk mengembangkan/menambah modal usahanya, tentu akan menambah omzet penjualannya dan akan menambah jumlah penghasilan mereka.

4. Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM yang menyusun laporan keuangan adalah 52% atau sebanyak 26 orang, sedangkan para pelaku UMKM yang

yang tidak menyusun laporan keuangan adalah 48% atau sebanyak 24 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak para pelaku UMKM yang sama sekali tidak menyusun laporan keuangan, hal ini sangat memprihatinkan, karena dengan laporan keuangan akan bisa diketahui berapa aset yang dimiliki, berapa laba/rugi yang diperoleh selama periode tertentu, dan bagaimana perkembangan usaha yang dilakukan. Disamping itu dengan menyusun laporan keuangan yang baik, akan sangat menguntungkan bagi para pelaku UMKM, terutama untuk persyaratan pengajuan pinjaman ke bank. Sebaliknya jika laporan keuangan sama sekali tidak disusun, maka mereka tidak akan bisa mengetahui bagaimana perkembangan usaha mereka secara riil, mereka hanya mengetahui perkembangan usahanya berdasarkan perkiraan serta angan-angan saja. Dan dengan tidak disusunnya laporan keuangan, mereka akan kesulitan untuk mengakses kredit dari bank, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha mereka.

5. Bentuk Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh para pelaku UMKM yang disusun dalam bentuk Laba Rugi adalah sebesar 92% atau sebanyak 48 orang sedangkan yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan yaitu 8% atau 2 orang.

Laporan yang disusun dalam bentuk laba rugi, artinya para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dibuat dengan mengurangkan seluruh biaya dengan seluruh pendapatan dan selisihnya adalah laba atau rugi yang diperoleh. Laporan disusun dengan cara mereka sendiri yang penting mereka mengerti, tanpa mengikuti prinsip akuntansi yang berterima umum.

Laporan disusun dalam bentuk Laporan Keuangan maksudnya adalah bahwa para pelaku UMKM menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Mereka berusaha mengikuti prinsip akuntansi yang berterima umum, walaupun belum sempurna betul.

6. Pelatihan Yang Pernah Diikuti

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang pernah diikuti para pelaku UMKM di Ponorogo yaitu pelatihan tentang pembukuan sebesar 10% atau sebanyak 5 orang, pelatihan Akuntansi 4% atau sebanyak 2 orang, pelatihan lainnya 18% sebanyak 9 orang, sementara itu yang belum pernah mengikuti pelatihan yaitu 68% atau sebanyak 34 orang. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa mayoritas para pelaku UMKM di Ponorogo belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Hal ini tentu berdampak kepada persepsi mereka terhadap pentingnya penyusunan laporan keuangan terkait usaha yang mereka lakukan, serta berdampak pada kualitas laporan keuangan yang mereka susun, yang akhirnya berdampak pula terhadap kelancaran akses kredit ke Bank, artinya laporan keuangan mereka belum bankable.

7. Kendala Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa kendala penyusunan laporan keuangan yang dialami oleh para pelaku UMKM adalah; yang tidak faham akuntansi sebesar 50% atau

sebanyak 25 orang, Tidak ada waktu sebesar 30% atau sebanyak 15 orang, lainnya sebesar 12% atau sebanyak 6 orang dan yang tidak mempunyai kendala dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebesar 8% atau sebanyak 4 orang.

Dari data tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kendala yang mereka hadapi kenapa tidak menyusun laporan keuangan adalah karena mereka tidak faham akuntansi serta mereka menganggap tidak penting terhadap laporan keuangan sehingga mereka tidak meluangkan waktu untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi terhadap para pelaku UMKM terkait pentingnya penyusunan laporan keuangan. Sedangkan mereka yang sudah menyusun laporan keuangan itu karena mereka sudah pernah mengikuti pelatihan pembukuan, sehingga mereka sudah faham pentingnya penyusunan laporan keuangan. Walaupun laporan keuangan yang mereka susun belum sepenuhnya benar.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah:

1. Kompetensi akuntansi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Ponorogo dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu ; dari Ketujuh variabel yang diteliti yang meliputi; omzet penjualan, sumber modal yang digunakan, penghasilan bersih setiap bulan, penyusunan laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, kendala dalam penyusunan laporan, pelatihan yang pernah diikuti oleh para pelaku UMKM di Ponorogo.
2. UMKM sangat dominan dibandingkan dengan kelompok usaha skala lainnya. Disamping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Sehingga pengembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 50% dari UMKM mengalami kesulitan permodalan. UMKM yang memanfaatkan sumber permodalan eksternal dari lembaga penyalur kredit hanya sebesar 20%. Alasan UMKM belum memanfaatkan kredit perbankan sebagian besar adalah faktor kebijakan, persyaratan (terutama terkait pembukuan perusahaan dan belum bankable) dan tingkat suku bunga kredit yang cukup tinggi.

SARAN

1. Dalam rangka untuk mengembangkan UMKM maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah (1) mengoptimalkan peran KKMB(Konsultan Keuangan Mitra Bank) dalam membina dan melakukan pendampingan para UMKM yang akan mengajukan permohonan kredit usaha (2) Mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil atau modal ventura (3) meningkatkan peran serta lembaga penjamin kredit untuk para UMKM yang terbentur akan adanya persyaratan agunan. Diharapkan dengan dilaksanakannya strategi-strategi diatas, para UMKM tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal pengajuan kredit modal usaha dari lembaga penyalur kredit terutama bank

2. Pemerintah Kabupaten Ponorogo, lebih memperhatikan perkembangan para pelaku UMKM di Ponorogo, khususnya terkait bantuan kredit dengan bunga yang lunak. Hal ini perlu dilakukan karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang banyak, sehingga mampu memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran yang ada di Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah kabupaten Ponorogo diharapkan memberikan pelatihan dalam 1) meningkatkan kompetensi keuangan UMKM sehingga berdampak terhadap kemudahan mereka dalam mengakses kredit dari perbankan (bantuan modal usaha), 2) cara-cara pengelolaan usaha dan 3) pendampingan usaha, agar usaha mereka bisa lebih eksis dan bisa terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andang Setyobudi, 2007, *Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
- Ardiana, dkk, 2010, *Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.12, No. 1, Maret 2010
- Herry Widayanarko, 2004, *Pengaruh Sistem Seleksi dan Program Pelatihan Terhadap Kompetensi, Kualitas Kerja dan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT Jarum)*, Tesis, PPS Universitas Diponegoro, Semarang.
- Idrus, 2000. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ; Tantangan dan Kebutuhan Bagi UMKM, www.scribd.com, tanggal akses, 01 Juli 2011
- Khusnatul Zulfa W. 2011, *Dampak Migrasi Terhadap Kondisi sosial Ekonomi keluarga TKI Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Penelitian Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Khusnatul Zulfa W. 2012, *Relevansi Nilai Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Perkotaan Mandiri Kabupaten Ponorogo*, Penelitian DIKTI
- Khusnatul Zulfa W. 2013, *Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kakilima Di Jalan Baru Kota Ponorogo*. Penelitian DIKTI
- Khusnatul Zulfa W.2014, *Analisis Akses Kredit Usaha Sektor informal di Kota Ponorogo* . Penelitian DIKTI
- Lilik Indrawati, 2006, *Analisis Aspek Keuangan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Tahun X, No. 1, Januari 2006
- Muhammad Jafar, 2004, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004
- Syahrir Effendi, 2005, *Analisis Peningkatan Kompetensi Pengusahaan Kecil Sesudah Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Yang Diselenggarakan Swisscontract Medan*, Jurnal Sistem Teknik Industri, Volume 6 No.5 , November 2005.
- Sindonews 2015
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah